

# Nilai Strategis dan Politis Pulau Jawa dalam Konstelasi Politik Global Negara-negara Eropa pada Awal Abad XIX

DJOKO MARIHANDONO

Dosen Program Studi Prancis, Departemen Sejarah,  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

---

## *Abstract*

During Dutch colonisation, Java island was not only famous as one of the islands in East India Archipelago which produced spices but also prepared workers who had a good endurance to fulfill the needs of colonial exploitation. This situation lasted since the beginning of VOC until Daendels' arrival, new Governor General in 1808. As a new holder of the highest power in Java, he had received two basic orders from Napoléon Bonaparte, French Emperor, who controlled Dutch at this moment: i.e. to defend Java against the attack of British naval fleet, and to improve Dutch colonial administration in Java. During his governance, Daendels tried to apply well operation's instruction that given by Louis Napoléon, Emperor Napoléon Bonaparte's brother who had been installed as King of Holland. In terms of the Rembouillet Treaty in 1810, the Emperor decided to govern himself Holland because it had a geographically strategic position vis-à-vis British naval strength in defending Europe. The governmental change in Holland brought out many consequences, especially in all Dutch colonies included Java. After receiving instruction from the Minister of Marine and Colony, Daendels stated that Java was a territory under France Emperor's protection.

The commander in chief of British admiralty in Port Louis ordered to Lord Minto, British Governor General in Madras, India for preparing a grand design to subdue Java. After Daendels' statement that Java was an inseparable part of French's global influence sphere, British admiralty took an important decision that Java had to be invaded and controlled. So British government in London agreed the admiralty's plan to mobilize all naval strength in South Africa and Ceylon for attack preparation against the combined French-Dutch army in Java. According the decision, the attack would be launched in August, 1811. This great event changed Java's strategically value from a spice island to be a strategically central point for the European colonial politic constellation.

---

*Keywords:* penaklukan Jawa, konstelasi politik, nilai strategis, pernyataan Daendels

## 1. Pendahuluan

Lebih dari 4 abad lalu, pulau Jawa dikenal oleh orang Eropa sebagai pulau produsen hasil bumi dan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan saat itu. Sebelumnya, hanya orang Portugis saja yang mengetahuinya. Berita tentang penemuan pulau Jawa sebagai penghasil rempah-rempah ini diketahui oleh orang Eropa lain setelah mereka membaca tulisan Jan Huygen van Linschoten. Pada abad XVI ia menemukan rahasia perdagangan dan navigasi milik bangsa Portugis dan menuangkannya dalam bukunya yang berjudul *Itinerario* (Hanna 1998:1). Dalam bukunya itu, Linschoten mengungkapkan informasi rahasia yang sangat berharga, yang intinya menyatakan bahwa pelabuhan utama di pulau Jawa adalah Sunda Kelapa. Di tempat ini ditemukan banyak lada bermutu tinggi, yang kualitasnya melebihi lada India atau Malabar, di samping juga kemenyan, bunga pala, kamper dan intan permata.<sup>1</sup> Orang Eropa bisa melakukan ekspedisi ke pelabuhan ini karena jalurnya sangat jelas. Di Sunda Kelapa, mereka tidak perlu mencari pedagang yang menjual barang-barang itu, karena orang Jawa berbondong-bondong datang sendiri untuk menawarkan dagangannya

dan menjualnya hingga ke Malaka.

Penemuan Linschoten ini ditindaklanjuti orang Belanda, Inggris, Prancis, dan Denmark yang memberangkatkan pelaut-pelautnya menuju Jawa dengan berpedoman buku *Itinerario* karya Linschoten. Mereka mengikuti jejak jalur pelaut Portugis menuju ke pelabuhan Banten, yang jaraknya 75 km di sebelah barat pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu, Banten merupakan daerah penghasil lada. Di pelabuhan ini para saudagar Timur seperti orang Cina, Arab, Makasar, dan Jawa berkumpul untuk menjual hasil buminya kepada para pendatang.

Pelabuhan Sunda Kelapa yang semula tidak sebesar pelabuhan Banten, lama kelamaan berkembang, karena di pelabuhan Banten tidak ditemukan barang-barang yang menarik para pelaut Eropa, seperti minuman dan hiburan. Di pelabuhan Sunda Kelapa dijual banyak minuman ber-alkohol rendah seperti arak, nira, sulingan air tebu, serta air tape yang dijadikan anggur oleh orang Cina. Para pelaut Eropa sangat menyukai minuman-minuman tersebut, sehingga membuat mereka sering berkunjung ke pelabuhan Sunda Kelapa di samping ke pelabuhan Banten. Linschoten menyatakan minuman tradisional ini sangat enak, seperti air susu sisa pembuatan keju yang rasanya manis, atau bahkan lebih enak dari itu (*ibid*: 3).

<sup>1</sup> Linschoten menjelaskan juga kegunaan lada yang banyak digunakan untuk keperluan dapur dan untuk pengobatan.

Mengingat banyak orang Portugis yang berada di Banten, orang Eropa lain, khususnya orang Belanda ingin menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, dengan membangun loji (gedung tempat berkumpul) di sekitar pelabuhan itu. Awalnya, pada Nopember 1610, Kapten Jacques l'Hermite<sup>2</sup> melakukan perundingan dengan Pangeran Jakatra untuk membangun pangkalan niaga.<sup>3</sup> Dengan membayar 1.200 ringgit, Kapten Jacques l'Hermite diberi tanah seluas 50 x 50 depa di dekat muara Timur sungai Ciliwung. Di tempat ini ia boleh membangun rumah (*huis*), *loge* (loji atau tempat berkumpul), *factorij* (pusat perdagangan), sehingga mereka bisa membangun pusat perdagangan di wilayah itu. Rumah yang dibangun dari batu dan kayu diberi nama *Nassau Huis*. Izin pembangunan pusat perdagangan Belanda ini diberikan Pangeran Jakatra dengan pertimbangan bahwa antara Pangeran Jakatra dan saudaranya Sultan Banten saat itu sedang terjadi

ketegangan, sehingga ada upaya dari Pangeran Jakatra untuk mengalihkan pusat perniagaan dari pelabuhan Banten ke pelabuhan Sunda Kelapa. Diharapkan, pelabuhan Sunda Kelapa akan memberi keuntungan yang besar bagi dirinya, di samping adanya jaminan militer dari pihak Belanda apabila terjadi serangan dari Kerajaan Banten.

Persaingan antara Inggris dan Belanda baik di Banten maupun di Jakatra dimulai pada awal tahun 1618 ketika Kapten Christopher Pring tiba di pelabuhan Banten diiringi oleh kapal *James Royall* (1.000 ton), *Royal* (900 ton), *Sift* (800 ton), *Bull* (400 ton), dan *Bee* (150 ton) yang membawa 500 orang tentara. Dikabarkan pula, sebuah armada lain yang dipimpin Sir Francis Dale akan bergabung dengan Kapten Christopher Pring di Banten untuk pamer kekuatan tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di Maluku.

Jan Pieterszoon Coen, yang baru diangkat menjadi Gubernur Jenderal Kongsi Dagang Belanda VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan Inggris di Banten. Setelah berunding dengan pihak Inggris, Jan Pieterszoon Coen memutuskan untuk memindahkan pusat utama usaha VOC dari Banten ke Jakatra dan mulai memindahkan petugas dan barang dagangan VOC ke *Nassau Huis*, sebuah loji yang berfungsi sebagai benteng di Jakatra. Ia juga memerintahkan untuk

<sup>2</sup> Kapten Jacques l'Hermite saat itu ditugasi oleh Gubernur Jenderal Pieter Both untuk mendirikan gedung yang disebut sebagai *Nassau Huis* yang akan digunakan sebagai tempat tinggal Kapten Watting, saudagar VOC yang ditunjuk sebagai wakil Gubernur Jenderal yang saat itu berpusat di Banda. P. Van der Chijs, *Daghregister uitgemaakt van het Castijl Batavia, derde deel*, 1878,

<sup>3</sup> Istana Pangeran Jakatra berada di sisi sungai Ciliwung di sekitar wilayah Sunda Kelapa sekarang.

membangun *Mauritius Huis*, dan menghubungkan keduanya dengan tembok batu, di atasnya diderakkan beberapa buah meriam, diarahkan ke istana Pangeran Jakatra dan pabeannya. Coen juga melipatgandakan penjaganya yang semula 25 orang menjadi 50 orang, yang dipersenjatai secara lengkap. *Nassau Huis* dan *Mauritius Huis* yang selanjutnya dikenal dengan nama Kastil Batavia. Pendirian Batavia dianggap sebagai penaklukan Jakatra. Kata Batavia digunakan setelah penguasa tertinggi di Belanda menyetujui penggunaan nama itu pada tanggal 15 Agustus 1621, setelah Coen gagal mengabadikan nama kota kelahirannya *Nieuw Hoorn* untuk memberi nama kota yang baru ini (Haans 1922:31).

Dalam laporannya kepada pemerintah di Belanda, Coen menyatakan bahwa untuk sementara Inggris bukan lagi merupakan ancaman setelah orang-orang Inggris dan Belanda di Eropa tidak lagi berperang, melainkan bekerjasama dan bersekutu. Selain itu orang Inggris di Maluku memperoleh hak atas wilayah tertentu di sana, tetapi tidak diizinkan untuk membangun benteng pertahanan di wilayah itu. Coen yakin bahwa armada Inggris tidak akan mampu untuk menguasai Jawa, karena armada laut Belanda telah melakukan blokade atas Banten dan perdagangan lada di daerah Banten sudah tidak ada lagi (*Idem*: 35).

## 2. Jawa di bawah Republik Bataf

Setelah mengalami pasang surut hubungan diplomatik, pada tahun 1784 negara Belanda mengadakan perjanjian persekutuan dengan Inggris demi mempertahankan kepentingan wilayah koloni Belanda. Akibat perjanjian itu, Prancis memandang Belanda sebagai musuh.<sup>4</sup> Banyak warga Belanda

<sup>4</sup> Perseteruan antara Prancis dan Inggris sudah berlangsung lama sejak abad XIV, yang dimulai dengan perang 100 tahun (*La guerre de cent ans*) bermula dari tahun 1328 dan berakhir tahun 1454 ketika tentara Prancis berhasil memukul mundur tentara Inggris dari wilayah Orléans. Perang ini terjadi sebagai akibat dari perebutan tahta di Prancis. Perang berikutnya terjadi pada masa pemerintahan Louis XIII, saat Richelieu menjabat sebagai Perdana Menteri. Konflik yang terjadi saat itu didasari atas masalah agama (pertentangan antara agama Protestan dan Katolik). Perang dengan Inggris terjadi kembali saat Raja Louis XIV berkuasa sampai dengan menjelang terjadinya Revolusi Prancis tahun 1789. Peperangan dua negara ini disebabkan karena masalah perdagangan, khususnya dengan wilayah koloni (di Canada, dan Amerika). Setelah meletusnya Revolusi Prancis, terjadi perang antara Prancis dan negara-negara Eropa yang menganut sistem monarki, khususnya Inggris, Austria dan Prusia. Hal ini disebabkan negara-negara itu mengkhawatirkan ide-ide Revolusi Prancis yang anti monarki menular ke wilayahnya. Pada masa pemerintahan Napoléon Bonaparte, perang antara Prancis dan Inggris mencapai puncaknya, khususnya dalam upaya menentang ekspansionisme Prancis.

yang anti dinasti Oranye (dinasti Raja Willem V yang memerebutkan saat itu) melarikan diri ke Prancis (Groenewold 1989:14-15). Prancis memberikan dukungan penuh kepada para pelarian yang membe-rontak dan membuat kerusuhan di Belanda. Setelah Revolusi Prancis 14 Juli 1789, para pelarian ini banyak yang mempelajari prinsip-prinsip Revolusi. Prinsip revolusi Prancis mengilhami para pelarian ini untuk mendirikan pemerintahan baru di Belanda dengan sistem pemerintahan baru seperti di Prancis (Pereboom 1989:15-16).

Para patriot yang berada di Belanda maupun yang melarikan diri tinggal di negara lain bersama dengan pasukan Prancis menyerang Belanda pada bulan Januari 1794. Penguasa negara Belanda saat itu (Raja Willem V) mengirim utusan untuk melakukakan perundingan, namun mengalami jalan buntu. Pada Januari 1795, pasukan patriot yang didukung oleh pasukan Prancis berhasil menguasai kota Utrecht dan beberapa kota lainnya, disusul kota Amsterdam, yang menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Berdasarkan Traktat Den Haag pada tahun 1795, atas bantuan Prancis, didirikanlah Republik Batav di bawah pimpinan Rutger Jan Schimmelpenninck.

Pendirian Republik Batav yang didukung oleh Prancis mendorong

koalisi Inggris dan Rusia untuk menyerang Belanda. Pada tahun 1797, pasukan Inggris dan Rusia mulai menyerang Belanda dengan mendaratkan pasukannya di Den Helder, namun bisa diatasi oleh pasukan Republik Batav bersama pasukan Prancis. Serangan Inggris dan Rusia kembali dilancarkan, sehingga pada tanggal 21 Agustus 1799, armada Inggris dan Rusia berhasil mendarat di Texel. Dan, pada 15 September 1799 pasukan koalisi Inggris dan Rusia berhasil masuk ke wilayah Belanda sampai di wilayah Sijpe. Baru pada tanggal 14 Oktober 1799 dilakukan gencatan senjata setelah Den Helder jatuh ke tangan pasukan koalisi Inggris dan Rusia. Dengan ditandatanganinya gencatan senjata itu, sebanyak 8.000 tawanan tentara Republik Batav dibebaskan, dan armada laut Republik Batav dirampas Inggris.

Berhubung negara Belanda saat itu masih dalam kondisi darurat perang, maka republik baru ini baru memiliki konstitusi pada tanggal 17 Maret 1798, tiga tahun setelah pendiriannya. Pasal 247 konstitusi itu menetapkan bahwa semua wilayah dan hutang VOC di Hindia Timur diambil alih oleh negara dan hak istimewanya dicabut mulai tanggal 31 Desember 1799. Pasal 248 menyebutkan bahwa para pemegang saham Kompeni akan diberikan ganti rugi. Pengelolaan

wilayah koloni di Hindia Timur<sup>5</sup> diserahkan kepada Dewan Wilayah Asia (*Aziatische Raad*) yang terdiri dari 9 orang anggota. Aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pemerintahan di Hindia Timur akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, hingga akhir tahun 1799, undang-undang itu belum berhasil disusun mengingat negara Belanda masih dalam kondisi perang melawan Inggris (Stapel 1940: 9)

Setelah VOC bubar, Gubernur Jenderal Van Overstraten, Dewan Hindia dan para pejabat dialihkan tugasnya dari dinas Kompeni menjadi dinas negara. Wilayah Hindia Timur saat itu sudah menyempit, karena sebagian wilayah di luar Jawa telah dikuasai oleh Inggris. Selain Jawa, hanya Ternate, Manado, Makasar dan

sekitarnya, bagian selatan Timor, Palembang dan kantor di Banjarmasin yang masih dikuasai oleh Belanda. Van Overstraten harus memikul tugas yang cukup berat, yakni mempertahankan wilayah-wilayah ini agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tanggal 11 Nopember 1800, Pemerintah Republik Bataf di Belanda mengangkat Van Overstraten menjadi Letnan Jenderal dalam dinas Republik Bataf. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak mengingat bahwa sejak tahun 1795 tidak ada lagi kapal-kapal Belanda yang datang ke wilayah Hindia Timur. Pemerintahan di wilayah koloni ini hanya menerima personil dan perintah tertulis melalui perantara, yakni kapal-kapal dari negara netral seperti Denmark atau Amerika. Kapal-kapal Kompeni yang ada tidak seimbang dengan kapal-kapal Inggris yang telah mulai mengadakan patroli di perairan Jawa. Peristiwa mengejutkan bagi pemerintah di Jawa terjadi pada tanggal 23 Agustus 1800 ketika lima kapal perang Inggris muncul di Teluk Batavia. Mereka menduduki kepulauan Onrust dan Kuiper<sup>6</sup> dan menyita semua kapal yang sedang direparasi di sana. Batavia disiaga-

<sup>5</sup> Istilah Hindia Timur (*Oost Indie*) digunakan untuk menyebut koloni Belanda di Asia. Dalam arsip Prancis wilayah ini disebut sebagai Hindia Timur Belanda (*Indes Orientales Néerlandaises*). Ditinjau dari sudut geografis, wilayah koloni Belanda terdiri atas Hindia Timur (*Oost Indie*) dan Hindia Barat (*West Indie*). Koloni di Hindia Timur juga sering disebut sebagai Hindia Belanda (*Nederlandsche-Indie*). Hindia Timur meliputi beberapa wilayah Belanda di Asia, seperti: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Malaka, sementara Hindia Barat adalah Guyana Belanda dan Curacao, yang meliputi wilayah Bonaire, Aruba, St. Martin Belanda, St. Eustatius dan Saba (Mangkudilaga 1981:11).

<sup>6</sup> Pulau Onrust dan pulau Kuiper terletak di Kepulauan Seribu. Pulau Kuiper saat ini bernama pulau Cipir. Pada zaman VOC kedua pulau ini digunakan sebagai tempat untuk mereparasi kapal-kapal yang rusak.

kan Van Overstraten.

Tiga hari kemudian, 26 Agustus 1800, nahkoda kapal Inggris, Kapten Ball, mengirim salah seorang perwiranya untuk menyampaikan kepada pemerintah di Jawa bahwa mereka datang atas perintah Panglima Angkatan Laut Inggris di India, Laksamana P. Rainier untuk mengepung pulau Jawa. Utusan itu menanyakan apakah ada usul dari Van Overstraten selaku penguasa di Jawa. Pertanyaan itu dijawab bahwa pemerintah di Hindia Timur tidak mengusulkan apa-apa (Stapel 1940: 14-16).

Armada Inggris melakukan blokade atas Teluk Jakarta, yang mengakibatkan persediaan makanan di Batavia terancam. Oleh karena itu, Van Overstraten menginstruksikan untuk melarang penjualan bahan pangan dan meminta penduduk di sekitar Batavia untuk menanam lahan mereka dengan padi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok bahan makanan bagi penduduk di Batavia.

Blokade Inggris diikuti dengan pendaratan pasukan di muara Marunda pada Oktober 1800. Penduduk pribumi diajak untuk bekerjasama dengan Inggris. Aksi militer ini diketahui oleh pemerintah di Batavia dan dibalas dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Nicolas Engelhard, anggota Dewan Hindia di Batavia. Akibat dari perlawanan ini, pasukan Inggris ditarik mundur,

kembali ke kapal mereka. Tanggal 9 Nopember 1800, armada Inggris meninggalkan Marunda untuk menuju ke Ternate dengan terlebih dahulu menghancurkan galangan kapal, penggilingan gula dan gudang di pulau Onrust dan Kuiper.

Kegagalan blokade atas pulau Jawa disebabkan karena jumlah armada Inggris terlampau kecil. Oleh karena itu, armada Inggris mengubah targetnya, tidak lagi melakukan blokade atas pulau Jawa tetapi memindahkannya ke Ternate. Willem Jacob Cranssen, Gubernur Ternate saat itu kewalahan mengatasi konflik yang terjadi antara Sultan Ternate dan Tidore. Pasukan di bawah komandonya sibuk dengan konflik itu. Serangan armada Inggris ke Ternate pada Februari 1801 dapat diatasi berkat bantuan dan kerjasama dengan Sultan Ternate. Namun, pada akhir April, armada Inggris mendarat lagi di Ternate dengan jumlah yang lebih besar. Gubernur Cranssen menolak untuk menyerah. Pertempuran terjadi pada tanggal 1 Mei 1801.

Akhirnya, pada tanggal 19 Juni 1801, Cranssen tertangkap dan dua hari kemudian pulau ini diserahkan kepada Inggris. Ia dikirim ke pulau Jawa. Setelah melalui persidangan di Mahkamah Militer, pembelaan Cranssen dapat diterima. Namanya direhabilitasi dengan menerima ganti rugi sebesar 12 ribu ringgit.

Pada 25 Maret 1802, terjadi peristiwa besar di Eropa, yang

melibatkan dua negara adidaya di Eropa saat itu, yaitu ditandatangani perjanjian Amiens (*Traité d'Amiens*).<sup>7</sup> Perjanjian ini dibuat antara Prancis, Republik Batavik dan Kerajaan Spanyol di satu pihak dan Kerajaan Inggris dan Irlandia di pihak lain. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Inggris akan mengembalikan semua wilayah yang telah dikuasainya kepada Prancis kecuali Ceylon. Perjanjian ini membawa harapan khususnya bagi pengelola di Hindia Timur. Sebagai akibatnya Dewan Wilayah Asia pada tanggal 11 Nopember 1802 memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah Republik Batavik agar wilayah koloni ini dapat segera memberikan keuntungan kepada pemerintah pusat. Komisi ini terdiri atas 6 orang, masing-masing Dirk van Hogendorp (mantan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa), J. Meerman, SC Nederburgh (mantan Komisararis Jenderal VOC di Batavia), FOJ Pontoi, W. Six, CA Verhuell dan

R Voute. Komisi ini berhasil menyusun undang-undang koloni yang terdiri atas 108 pasal yang disahkan pada tanggal 27 September 1804.<sup>8</sup>

Perjanjian Amiens disambut gembira oleh pemerintah Republik Batavik, karena koloni yang telah dikuasai oleh Inggris dikembalikan kepada pemerintahan Republik Batavik. Pemerintah pusat di Belanda mengangkat JA de Mist, Laksamana Dekker dan JW Janssens untuk menerima penyerahan Tanjung Harapan dari Inggris. Pada bulan Februari 1803, Tanjung Harapan diserahkan kepada Belanda. Jan Willem Janssens diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan.

Di Hindia Timur, Gubernur Jenderal Johannes Sieberg membentuk komisi serah terima Maluku termasuk Ambon dan Banda. Komisi ini terdiri atas Laksamana AA Buyskess, Willem Jacob Cranssen (mantan Gubernur Ternate), dan Van Boechholtz. Pengambilalihan wilayah Maluku berjalan lancar. Untuk mengelola wilayah itu Willem Jacob Cranssen diangkat menjadi

<sup>7</sup> Akta perjanjian Amiens berisi 22 pasal ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1802 oleh Napoléon Bonaparte (Konsul Pertama Republik Prancis), Azara (mewakili Raja Spanyol), Jan Rutger Schimmelpenninck (wakil Republik Batavik) di satu pihak dan Carnwallis (mewakili Kerajaan Inggris dan Irlandia) di pihak lain. ([http://napoleon.org/traité\\_d'amiens.html](http://napoleon.org/traité_d'amiens.html)).

<sup>8</sup> Pada saat undang-undang ini disahkan, perang antara Prancis dan Inggris telah meletus kembali. Umur perjanjian Amiens hanya 1 tahun saja. Pengingkaran perjanjian Amiens ini karena Prancis menuduh Inggris telah melakukan koalisi dengan beberapa negara lain yang dianggap membentuk suatu kekuatan baru di Eropa.



Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Perjanjian Amiens membawa pengaruh positif pada kehidupan perdagangan dan lalu lintas laut. Kegiatan perdagangan di pelabuhan Belanda yang semula tenang hidup kembali. Ratusan kapal dagang kemudian diberangkatkan ke penjuru dunia. Bahkan, para pedagang di Amsterdam telah menandatangani kontrak dagang dengan pemerintah untuk pembelian 15 juta pon kopi dari Jawa (*ibid*:18-19). Untuk melawan para bajak laut dan gangguan dari penguasa pribumi, pemerintah pusat di Belanda mengirim empat kapal perang di bawah komando Laksamana S. Dekker ke Hindia Timur melewati Tanjung Harapan untuk pamer kekuatan. Sementara itu, Laksamana Muda Pieter Hartsinck yang pada saat itu masih berada di Laut Tengah diperintahkan untuk segera menuju ke Hindia Timur bersama dengan 4 armadanya untuk bergabung dengan Dekker. Laksamana Hartsinck harus singgah di Spanyol untuk mengambil bekal perjalanan. Ketika armadanya meninggalkan Spanyol, perang antara Prancis dan Inggris pecah kembali. Namun, Laksamana Muda Pieter Hartsinck berhasil sampai di Batavia dengan selamat.

Pada tahun 1805 terjadi perubahan penting di Belanda. Di tahun itu diberlakukan Konstitusi Baru Tahun 1805. Pemerintahan

pusat di Belanda tetap dipimpin oleh Jan Rutger Schimmelpenninck. Undang-undang untuk wilayah koloni di Hindia Timur yang telah disahkan pada 27 September 1804 dicabut pada bulan Agustus 1805 dan diganti dengan "*Reglement op het Beleid van de Regeering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen en van den Handel op en in dezelve Bezittingen*," Peraturan kebijakan pemerintah, peradilan dan perdagangan di wilayah Asia, dan diberlakukan mulai tanggal 27 Januari 1806. Undang-undang koloni ini dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan undang-undang tahun 1804, karena lebih mementingkan kemakmuran penduduk pribumi di wilayah koloni.

Sementara itu, di Hindia Timur, pengunduran diri Johannes Sieberg sebagai Gubernur Jenderal dikabulkan pada tanggal 19 Oktober 1804. Dengan pengunduran diri Sieberg, berarti terjadi kekosongan di Batavia. Untuk mengisinya, pimpinan tertinggi Republik Bataf, Schimmelpenninck menunjuk Albertus Henricus Wiese, mantan Direktur Jenderal Dewan Hindia menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur yang berkedudukan di Batavia pada tanggal 15 Juni 1805. Namun, dengan diberlakukannya peraturan kebijakan pemerintah sejak tanggal 26 Januari 1806, Schimmelpenninck memperoleh desakan dari komite penyusun peraturan itu untuk segera menja-

lankan peraturan kebijakan pemerintahan yang dianggap akan membawa kesejahteraan bagi penduduk pribumi di wilayah koloni. Untuk merealisasikannya, Schimmelpenninck mengangkat dua orang yang akan ditempatkan di Hindia Timur, bagi pelaksana peraturan itu. Mereka adalah Carel Hendrik van Grasvelt yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal (menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese) dan C Th. Elout sebagai Direktur Jenderal Dewan Hindia (*Raad van Indie*) yang selama ini kosong. Keduanya berangkat dengan mengambil jalur melalui New York, Amerika Serikat. Setibanya di New York, sebelum bertolak menuju Jawa, mereka menerima surat Schimmelpenninck yang berisi perintah bagi mereka berdua untuk kembali ke Belanda, karena Republik Batavia telah dibubarkan dan diganti dengan Kerajaan Belanda dengan Louis Napoléon Bonaparte sebagai rajanya.<sup>9</sup>

Pengangkatan Louis Napoléon Bonaparte menjadi Raja Belanda tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi di Eropa saat itu.

<sup>9</sup> Louis Napoléon Bonaparte adalah adik kandung Napoléon Bonaparte Kaisar Prancis. Permintaan penggabungan Belanda menjadi wilayah Prancis yang diminta sendiri oleh rakyat Belanda memiliki arti strategis bagi keamanan Eropa, khususnya untuk menghadapi serangan aliansi Inggris, Rusia, dan Prusia.

Tanjung Harapan pada awal tahun 1806 telah jatuh ke tangan Inggris. Penaklukan wilayah koloni Belanda oleh Inggris yang berada di bawah perlindungan Napoléon Bonaparte dimulai, ketika pada bulan Nopember 1805 Gubernur Jenderal Tanjung Harapan Jan Willem Janssens mendengar berita dari sebuah kapal Amerika bahwa terdapat beberapa kapal Inggris yang melakukan patroli di dekat Tanjung Harapan. Janssens menyiasakan tentaranya untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Baru pada 4 Januari 1806, kehadiran armada Inggris tampak dari gunung Leeuwen. Armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Home Pohan mulai mendekati Tanjung Harapan. Kapal-kapal Inggris akhirnya mendarat di Tanjung Harapan pada 6 Januari 1806. Armada itu mendaratkan 4 ribu tentara di bawah pimpinan Jenderal David Baird. Dengan mudah, tentara Inggris menguasai Tanjung Harapan tanpa mendapat perlawanan sedikitpun dari tentara Janssens. Gubernur Jenderal Belanda ini menganggap bahwa kota sudah tidak dapat diper-tahankan lagi, sehingga mereka harus mundur ke pedalaman. Kastil di Tanjung Harapan di bawah komando Kolonel Van Prophalov tidak mampu melawan pasukan Inggris.

Akhirnya, tanggal 10 Januari 1806, para perwira Inggris mem-

persiapkan penyerahan kekuasaan dengan mengajukan persyaratan yang menguntungkan penduduk kepada penguasa Belanda di Tanjung Harapan. Isi Persyaratan itu antara lain bahwa penduduk tetap akan menggunakan hukum Belanda dengan tetap mempertahankan adat kebiasaan setempat. Apabila bersedia menyerah, tentara Belanda yang berjumlah 1.500 orang beserta peralatan tempurnya akan dikembalikan ke negara Belanda. Tawaran ini disepakati oleh Gubernur Jenderal Janssens, sehingga pada 23 Januari 1806, Gubernur Jenderal Janssens menandatangani kapitulasi penyerahan Tanjung Harapan.

Ancaman negara Belanda terhadap serangan Inggris sebagai akibat dari ultimatum politik *Blocus Continental*<sup>10</sup> Napoléon Bonaparte, menjadi semakin besar. Untuk itu Napoléon Bonaparte mengangkat adiknya menjadi Raja Belanda. Prediksi Napoléon Bonaparte

ternyata tidak salah. Pada tahun 1806, Inggris bersama Prusia mendarat di Wilayah Groningen dan Friesland. Raja Louis Napoléon yang belum lama menjabat sebagai Raja Belanda, memanggil kembali Herman Willem Daendels (selanjutnya disebut Daendels), seorang perwira Belanda yang berpangkat Letnan Jenderal yang pernah bertugas di Legiun Asing (*Légion Etrangère*) Prancis. Daendels mengundurkan diri dari dinas ketenteraan pada zaman Republik Bataf.<sup>11</sup> Daendels bersedia memimpin pasukan Belanda kembali dan berhasil membebaskan wilayah Groningen dan Friesland dari serangan koalisi itu.

Kondisi keamanan di Hindia Timur, khususnya Jawa berubah, ketika pada tanggal 18 Oktober 1806, armada Inggris dengan tujuh kapal perang muncul di Teluk Batavia di bawah pimpinan Laksamana Sir Edward Pellew. Ia melancarkan serangan dengan menggunakan 18 sekoci pendarat. Kapal-kapal dagang yang sedang

<sup>10</sup> Berdasarkan Dekrit Berlin tanggal 21 Nopember 1806, yang ditandatangani oleh Napoléon Bonaparte Inggris dinyatakan diblokade (pasal 1); semua produk Inggris atau toko-toko milik orang Inggris dimusnahkan (pasal 2). Walaupun mendapatkan protes dari para pelaut, dekrit ini tetap dijalankan. Data kapal yang merapat di kota Bordeaux pada tahun 1807 terdapat 121, sementara tahun 1811 hanya 11 kapal saja (Latreille 1974:191; Nembrini 1985:100-101).

<sup>11</sup> Pengunduran diri Daendels dari Dinas Ketenteraan Republik Bataf bersumber

dari ditolaknya konsep strategi pertahanannya ketika Belanda diserang oleh pihak Inggris di Den Helder. Dari peristiwa penyerangan itu, banyak korban jatuh dari tentara Republik Bataf. Akibat dari begitu banyaknya korban, Daendels mengambil cuti dari dinas ketenteraan dan menjadi petani dengan alasan untuk mencari ketenangan. Dua tahun kemudian, tanggal 23 Desember 1802, atas permohonannya sendiri, ia meminta berhenti dari dinas militer.

berlabuh di pelabuhan Batavia dihancurkan oleh armada Inggris. Tercatat 20 kapal dagang dan 8 kapal perang yang berlabuh di pelabuhan Batavia hancur dan tenggelam. Demikian pula kapal-kapal yang sedang berlabuh di pulau Onrust dan Kuiper. Tentara Inggris tidak melakukan pendaratan di Batavia, tetapi melanjutkan perjalanannya ke wilayah timur.

Setelah penyerangan Inggris ke pelabuhan Batavia pada bulan Oktober itu, pelabuhan kondisinya tidak terjamin, karena tidak ada satu kapal perang Belanda pun yang berada di pelabuhan itu. Pada bulan April 1807 kapal perang Inggris telah merampas 4 buah kapal dagang yang berlayar di teluk Batavia. Atas kejadian tersebut, Laksamana Hartsinck sebagai penanggung jawab angkatan laut meminta pengunduran dirinya kepada Gubernur Jenderal Wiese. Sejak itu komandan angkatan laut langsung dipegang Gubernur Jenderal Wiese. Setelah pengunduran diri Hartsinck, satu-satunya kapal perang pemerintah kolonial yang masih tersisa adalah kapal perang jenis korvet dengan nama lambung *Scorpio*. Kapal *Scorpio* diberitakan hilang ketika menjalankan tugasnya mengawal kapal dagang dari Batavia ke Semarang. Di dekat pelabuhan Semarang, kapal yang memiliki 20 meriam ini diserang oleh fregat Inggris, kemudian dirampas.

Mendengar berita ini, Wiese memerintahkan agar kapal perang yang masih tersisa, awak dan persenjataannya digabungkan dengan angkatan darat, yang menjadikan wilayah koloni di Hindia Timur tidak lagi memiliki armada laut.

Pada akhir bulan Nopember 1807, armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Pellew dengan delapan kapal perangnya muncul di Selat Madura. Ia mengirim anak buahnya dengan menaiki sekoci untuk menyampaikan surat kepada Komandan Laut Gresik, Kapten Cowell. Surat itu berisi permintaan Laksamana Pellew agar Kapten Cowell bersedia menyerahkan kapal-kapal Belanda yang berlabuh di Gresik. Permintaan Cowell dibalas dengan penyitaan sekoci, menangkap utusan itu dan mengirimnya ke Surabaya. Atas kejadian itu, Pellew mendaratkan 1.400 tentaranya ke Gresik, menyita dua kapal perang yang berlabuh di sana, dan menduduki kota Gresik dengan mudah, karena kota itu sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda.<sup>12</sup> Kapten Cowell yang mundur sampai ke kota Surabaya, mengirim kembali para utusan itu kepada Laksamana Pellew disertai wakil *Gezaghebber* Surabaya

<sup>12</sup> Keputusan pendaratan tentara Pellew ke kota Gresik dikarenakan anaknya ikut serta dalam rombongan utusan yang ditahan oleh Kapten Cowell.

DF van Alphen.

Kehadiran van Alphen meredakan kemarahan Pellew, untuk tidak melakukan ekspansi ke wilayah lain. Akhirnya, pada 3 Desember 1807, dibuat kesepakatan antara Pellew dan Van Alphen. Kesepakatan itu berisi: orang Inggris segera meninggalkan Gresik tanpa menuntut pampasan perang; kapal-kapal perang Belanda yang tidak terpakai harus segera dimusnahkan; semua peralatan tempur di kota Gresik dan pertahanan di Madura harus segera dibongkar; orang-orang Belanda akan memasok air minum secara gratis dan bersedia menjual daging bahan makanan kepada armada Inggris (*Ibid* 1940: 25-27).

Dengan kondisi seperti ini, wilayah koloni di Hindia Timur sudah tidak lagi memiliki kapal perang, sehingga memudahkan bagi Inggris untuk melakukan blokade laut atas pulau Jawa.

### 3. Jawa di Bawah Kerajaan Belanda

Di negeri Belanda, dengan berdirinya Kerajaan, semua wilayah koloninya berada di bawah kekuasaan Raja Louis Napoléon dan berada di bawah perlindungan Napoléon Bonaparte, Kaisar Prancis.

Bagi Prancis, pulau Jawa adalah salah satu pulau yang berada di wilayah Hindia Timur dengan makna strategis. Banyak laporan khususnya tentang kondisi di

Batavia yang disampaikan baik kepada Napoléon Bonaparte di Paris maupun kepada Louis Napoléon di Amsterdam. Napoléon Bonaparte mengetahui makna strategis dan ekonomis pulau Jawa pertama kali setelah memperoleh laporan dari Jenderal Houdetot yang mengunjungi pulau itu pada tanggal 23 Ventose tahun ke-IX (20 Februari 1800). Dalam laporannya kepada Napoléon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai *Premier Consul* (konsul Pertama), Houdetot melaporkan bahwa kondisi pulau Jawa tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kesalahan cara memerintahnya, banyaknya pegawai VOC yang korupsi, melakukan monopoli, dan salah mengelolanya. Houdetot juga menjelaskan bahaya yang akan datang dari pihak Inggris. Houdetot memberikan saran, sebaiknya jangan sampai orang Inggris menguasai India, sebab India apabila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar bagi Eropa, karena India memiliki kekayaan melebihi kekayaan seluruh negara Eropa. Laporan Houdetot diperkuat dengan laporan Kapten Géni Tombe dari Batalyon XII Prancis yang pernah singgah di pulau Jawa. Géni Tombe menyampaikan pertahanan di Batavia sangat lemah yang memungkinkan bagi pihak musuh untuk mendaratkan pasukannya dengan mudah. Pantai Cilincing,

yang jaraknya 2 lieu (1 lieu sama dengan 4 km) di sebelah timur Batavia merupakan tempat yang sangat rawan yang dapat digunakan sebagai pintu masuk musuh untuk menguasai kota Batavia. Prancis menyangkan mengapa pemerintah di Batavia tidak melakukan apa-apa untuk mempertahankan kota Batavia dari kemungkinan serangan Inggris. Padahal, menurut Houdetot, Jawa setiap saat dapat disiapkan untuk mendukung semua yang diperlukan dalam rangka melakukan ekspedisi ke India. Orang Jawa dapat dijadikan tentara yang baik dan sanggup bertahan cukup lama untuk berperang di wilayah Hindustan. Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bagi Republik Batavia untuk mengamankan pulau terpenting di wilayah koloni Hindia Timur ini. Potensi Jawa dan *Ile de France* (di dekat Kepulauan Mauritius) akan mampu dapat mematahkan kekuatan Inggris di lautan Hindia.<sup>13</sup>

Napoléon Bonaparte juga menerima usul dari komisi penyusun undang-undang koloni Republik

Batavia tanggal 31 Agustus 1803 tentang bagaimana memanfaatkan dan mempertahankan pulau Jawa. Ada tujuh saran yang dibuat oleh komisi ini, antara lain: perlu dibentuknya pasukan inti di Asia yang beranggotakan 4-5 ribu tentara Eropa terpilih; segera dibentuk pasukan pribumi yang setiap saat dapat dilipatgandakan jumlahnya tanpa harus menambah jumlah perwira dan ajudannya; menjadikan pulau Jawa sebagai pusat dari wilayah koloni, sementara pulau-pulau lain berada di bawah koordinasinya; perlu dibangun satu atau dua benteng di Batavia, yang bisa digunakan sebagai tempat perlindungan apabila terjadi serangan dari Inggris; di masa damai perlu dibentuk suatu armada ringan untuk melawan bajak laut yang biasanya berasal dari penguasa pribumi; apabila terjadi perang, disiapkan armada fregat untuk melindungi Malaka dan Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok untuk melindungi jalur perdagangan, sehingga kapal musuh harus memutar jauh, atau mendapat resiko ditangkap apabila melalui jalur itu; perlunya disediakan kapal cepat yang bermarkas di Pantai Barat Prancis untuk menyampaikan berita penting pemerintah di Asia.

Tahun 1806 dan 1807 merupakan tahun kehancuran militer di Hindia Timur. Hal ini terjadi sebagai akibat terjadinya beberapa serangan

<sup>13</sup> Arsip yang berisi laporan ini disimpan di CARAN (*Centre d'Accueil et de Recherche des Archives Nationales*) di Rue des Ecoles, Paris. Laporan ini terdapat pada bundel *Memoires et documents Indes Orientales*. Laporan Houdetot berada di bawah judul: *Reflexions politiques sur l'Inde, présenté au Premier Consul par le Général de Brigade Houdetot* di kotak 1215, seri AF.

Inggris ke beberapa wilayah koloni.<sup>14</sup> Jatuhnya Tanjung Harapan dan ancaman Inggris yang akan menguasai wilayah koloni Belanda di Timur Tanjung Harapan membuat Raja Louis Napoléon mengkhawatirkan nasib pulau Jawa. Ia berpendapat bahwa koloni Hindia Timur, khususnya Jawa harus dipimpin oleh seorang militer yang kuat, agar mampu mempertahankan pulau itu dari serangan Inggris dan memiliki potensi untuk melakukan perubahan.

Setelah melakukan konsultasi dengan kakaknya Kaisar Napoléon Bonaparte, Louis Napoléon membatalkan rencananya mengangkat Daendels sebagai Gubernur Friesland, melainkan sebagai Gubernur Jenderal wilayah Hindia Timur. Daendels adalah satu-satunya perwira tinggi Belanda yang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah itu, karena sebagai mantan komandan *Legion Etrangère* ia dianggap memiliki kemampuan itu dan dianggap mampu untuk memperjuangkan kepentingan Prancis di sana. Pada tanggal 27 Januari 1807, Louis Napoléon mengangkat

Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur dengan mengemban dua tugas utama, yakni mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi wilayah itu. Menjelang keberangkatan ke pulau Jawa tanggal 9 Februari 1807, Louis Napoléon menyerahkan tiga instruksi, masing-masing instruksi bagi Gubernur Jenderal sebanyak 37 pasal; instruksi bagi Gubernur Jenderal untuk membubarkan Pemerintahan Tinggi di Batavia (*Hooge Regering*) sebanyak 6 pasal; dan instruksi bagi Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia (*Raad van Hindie*) sebanyak 25 pasal.

Dalam perjalanannya menuju Jawa, dari Belanda Daendels menuju Paris untuk bertemu dengan Napoléon Bonaparte sesuai pesan yang diberikan oleh Raja Belanda. Hasil pertemuannya dengan Kaisar Napoléon Bonaparte adalah penegasan kembali akan dua tugas utama yang diembankan kepada Daendels, dan yang telah diuraikan dalam ketiga instruksi yang telah disampaikan kepadanya. Dari Paris dia menuju ke pelabuhan Bordeaux, tetapi tidak ada satu kapal pun yang bertolak menuju ke Jawa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menuju ke pelabuhan Pasaje di Spanyol. Di kota Madrid, Daendels berjumpa dengan Melvill van Cambée, seorang perwira angkatan laut yang baru tiba dari Batavia. Melvil van Cambée mendarat di

<sup>14</sup> Untuk mengimbangi klaim Napoléon Bonaparte yang melakukan politik *Blocus Continental* atas wilayah pantai Eropa kepada Inggris dan koalisinya, Inggris membalas klaim itu dengan menyatakan bahwa semua wilayah di sebelah timur Tanjung Harapan akan menjadi milik Inggris.

pelabuhan Pasaje, dan dalam perjalanannya menuju Paris berjumpa dengan Daendels di Madrid. Dalam pertemuan itu, Carnbée menyerahkan nota dalam bentuk memori kepada Daendels yang berisi data para penguasa Eropa yang bertugas di pulau Jawa. Nota itu juga berisi tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian para pejabat yang akan menuju ke Jawa, sebagaimana Daendels dalam menjalankan tugasnya di Jawa (arsip ini berada di CARAN, Paris seri AF IV nomor 1799, lembar 43).

Setelah berlayar selama 10 bulan, Daendels berhasil mendarat di Anyer pada 1 Januari 1808. Kedatangannya disambut oleh komandan militer Banten kolonel PP Du Puy mewakili Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese. Dengan menggunakan jalan darat, Daendels dan rombongan memerlukan waktu empat hari sampai di Batavia guna bertemu dengan Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese. Walaupun semua dokumen yang dibawa oleh Daendels telah dirampas oleh Inggris di Laut Tengah, namun pada tanggal 14 Januari 1808, Wiese menyerahkan kekuasaannya ke Daendels.<sup>15</sup> Dengan dimulainya

pemerintahan Daendels di Jawa, kebijakan yang menjadi pusat perhatian pemerintah kolonial berubah, yang semula berorientasi ke negara Belanda berubah ke pulau Jawa karena putusanya hubungan antara pulau Jawa dan dunia luar sebagai akibat dari blokade armada Inggris atas pulau Jawa (Day 1904:148).

#### 4. Jawa di bawah Gubernur Jenderal Daendels

Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Batavia dari tanggal 14 Januari 1808 sampai dengan 16 Mei 1811 (3 tahun 4 bulan). Selama pemerintahannya itu, banyak hal dilakukan. Sebagai orang nomor satu di wilayah koloni ini Daendels menguasai angkatan darat, angkatan laut, serta memiliki wewenang untuk mengangkat dan mengisi jabatan dalam angkatan darat dan angkatan laut. Mengingat bahwa sejak kehadiran Daendels di Jawa, wilayah Eropa dan wilayah timur Tanjung Harapan termasuk Jawa dalam keadaan perang, sebagai akibat dari reaksi Inggris atas politik *Blocus Continental* Napoléon Bonaparte. Oleh karena itu, sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, ia segera melakukan reorganisasi di bidang militer dan administrasi pemerintahan. Reorganisasi di bidang militer dilakukan dengan menata kembali struktur dan personil militer baik bagi angkatan laut maupun angkatan darat.

<sup>15</sup> Gubernur Jenderal Wiese bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels walaupun tanpa sepucuk surat, karena sebelumnya Wiese telah mengetahui penggantian jabatan Gubernur Jenderal di Batavia itu dari koran Amerika (Stapel 1940:32-35).



Pelabuhan armada laut dibangun di Ujung Kulon dan di Teluk Manari, dan Gresik. Penambahan jumlah personil angkatan darat disesuaikan dengan struktur angkatan darat Prancis. Sistem pertahanan darat diterapkan, termasuk pembangunan beberapa benteng, terutama pembangunan benteng Meester Cornelis yang dijadikan markas pertahanan darat. Untuk menjamin komunikasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta meningkatkan mobilitas pasukan, dibangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang jaraknya mencapai 600 pal (1.000 kilometer).

Di bidang pemerintahan, tindakan Daendels yang pertama kali dilakukan seuasai pelantikannya sebagai Gubernur Jenderal adalah membubarkan Dewan Hindia (*Raad van Indie*), mengganti personilnya dan mengubah struktur dewan disesuaikan dengan instruksi Raja Belanda.<sup>16</sup> Setelah penggantian pucuk pimpinan di Batavia,

Daendels mulai menata hirarki kewilayahan dan kedinasan yang ada di wilayah koloni ini. Pembenahan hirarki kewilayahan dilakukan dengan membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur<sup>17</sup>, mereposisi hubungan antara pemerintah dan raja-raja Jawa (Banten, Cirebon, Surakarta, dan Yogyakarta), menata kota-kota besar di Jawa (Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya). Pembenahan hirarki kedinasan dilakukan dengan melakukan pembenahan di bidang peradilan, keuangan, perdagangan, pertanian, dan keuangan.

Sesuai instruksi yang diterima dari Raja Belanda, Daendels harus bertanggung jawab kepada dan mengirimkan laporan kepada Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim tentang semua yang terjadi dalam pemerintahannya secara periodik. Namun, instruksi ini hanya bisa dilakukan pada awal pemerintahannya, karena masih terdapat beberapa kapal dari negara netral yang berlabuh di pelabuhan di Jawa, khususnya Batavia yang bertolak ke Eropa dan Amerika. Dengan diblokadanya pulau Jawa

<sup>16</sup> Penyesuaian struktur Dewan Hindia didasarkan pada instruksi yang diterima dari Louis Napoléon tanggal 9 Februari 1807 tentang Pembubaran pemerintahan tinggi di Batavia (*Hooge Regering*).

<sup>17</sup> Saat Napoléon Bonaparte, wilayah Prancis dibagi menjadi beberapa Prefektur (*prefecture*). Satu prefektur dipimpin seorang Prefek (*Préfet*). Daendels membagi wilayah Pantai Timur Laut Jawa (Noord-ostkust) dan Ujung Jawa (*Oosthoek*) menjadi 9 prefektur yang dipimpin oleh prefek. Pada masa Daendels, Prefek adalah pejabat setingkat residen yang dijabat orang Eropa.

<sup>18</sup> Penyerangan armada Inggris ke Ambon dan sekitarnya dimulai pada Februari 1810 ketika Inggris mendaratkan 300 tentara Spoy (orang India) ke Ambon. Pada tanggal 18 Februari 1810, benteng *Victoria* di Ambon diserbu, dan satu hari kemudian benteng itu jatuh ke tangan Inggris. Dengan jatuhnya benteng maka Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya dikuasai Inggris.

oleh armada Inggris, pulau Jawa terisolasi. Kapal-kapal dagang Amerika dan Eropa tidak bisa mencapai pulau Jawa. Hanya perahu-perahu kecil milik nelayan yang masih berani berlayar. Pada bulan Mei 1810<sup>18</sup> diterima kabar mengejutkan tentang jatuhnya kota Ambon dan pulau-pulau sekitarnya ke tangan Inggris. Bagi Daendels berita tersebut sangat mengejutkan karena Ambon merupakan pangkalan terkuat di wilayah koloni bagian Timur. Menurut Daendels pertahanan di Ambon sudah cukup kuat karena dipimpin Kolonel JPF Filz sebagai orang yang cakap dalam bidang kemiliteran, dan didukung tentara yang jumlahnya cukup besar (1.500 orang), ditambah beberapa ratus tentara sipil bersenjata.

Dengan jatuhnya Ambon dan pulau di sekitarnya, Daendels memperkirakan bahwa suatu saat Jawa pasti akan diserang oleh Inggris. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk segera membangun benteng pertahanan yang tempatnya ditentukan di Meester Cornelis, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 29 Mei 1810. Benteng Meester Cornelis selesai dibangun dan siap digunakan pada tanggal 7 Maret 1811. Benteng ini digunakan sebagai markas angkatan darat.

Sementara itu dari koran *Gazette* terbitan *Ile de France* tanggal 21 April 1810 ditemukan berita tentang peran strategis Belanda bagi Prancis.

Koran ini dibawa oleh kapal dagang Amerika yang berhasil menembus blokade Inggris. Dari berita ini Daendels menyampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Hindia dan mengharapkan bahwa dalam waktu yang tidak terlampau lama, negara Belanda akan digabungkan dengan Prancis. Atas dasar pemahamannya ini, Daendels pada tanggal 3 Juli 1810 menyampaikan harapannya secara formal di depan sidang Dewan Hindia di Batavia agar negara Belanda digabungkan dengan Prancis dan langsung berada di bawah perlindungan Napoléon Bonaparte. Bila hal itu terjadi akan menguntungkan Belanda termasuk Jawa (Marihandono 2004:22), karena Jawa juga akan mendapatkan perlindungan dari Kaisar Napoléon Bonaparte.

Peristiwa besar penggabungan Belanda dengan Prancis terjadi di Eropa tanggal 9 Juli 1810. Di Rembouillet, Napoléon Bonaparte menandatangani penggabungan negara Belanda dan menjadi bagian dari wilayah Prancis. Aneksasi ini dilakukan karena Napoléon Bonaparte tak bisa menerima kenyataan adanya beberapa kapal Inggris yang berlabuh di pelabuhan Belanda. Berlabuhnya kapal-kapal Inggris ini membuat Napoléon Bonaparte marah kepada adiknya Louis Napoléon, dan menurunkannya dari tahta Raja Belanda. Dengan alasan bahwa negara Belanda memiliki peran strategis bagi Prancis

dan sebagai pintu utama kemungkinan mendaratnya pasukan Inggris ke Eropa, maka harus ada jaminan keamanan di perbatasan demi kepentingan kedua negara. Dengan demikian, Belanda harus diperkuat di bawah komando dan pengawasan langsung Napoléon Bonaparte.

Kabar penggabungan Belanda ke wilayah Prancis secara informal diterima Daendels pada tanggal 13 Desember 1810 di Semarang yang disampaikan oleh nahkoda kapal Amerika. Berita informal ini membuat Daendels semakin yakin bahwa apa yang selama ini diharapkan akan menjadi kenyataan. Akhirnya, berita penggabungan Belanda ke wilayah Prancis diterima oleh Daendels pada tanggal 17 Februari 1811. Gubernur Jenderal menerima surat perintah dari Menteri Angkatan Laut dan Koloni di Amsterdam yang dibawa oleh kapal perang Prancis *Claudius Civilis* di bawah komandan Laksamana Pool yang merapat di pelabuhan Semarang.<sup>19</sup> Isi surat perintah itu adalah agar semua pejabat di wilayah koloni melaku-

kukan sumpah setia kepada Kaisar Napoléon Bonaparte. Sebagai kelanjutan dari perintah itu, Daendels meminta agar Dewan Hindia bersidang pada tanggal 20 Februari 1811 untuk melaksanakan sumpah setia kepada Napoléon Bonaparte (Hageman 1856:279). Sidang Dewan Hindia kali ini untuk menyatakan sumpah setia kepada Kaisar Prancis Napoléon Bonaparte. Pengambilan sumpah para pejabat tinggi di Batavia disusul dengan sumpah yang sama bagi semua pejabat di Batavia. Sebuah komisi dibentuk untuk mengambil tindakan yang diperlukan seperti mengubah simbol Belanda menjadi simbol Prancis, mengubah sumpah dan perumusan vonis hukuman, menurunkan bendera Belanda dan menggantikannya dengan bendera Prancis. Setelah selesai acara ini, dibuat pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman di halaman gedung pemerintah agar diketahui oleh umum. Pengumuman itu dibuat dalam bahasa Belanda, Cina dan bahasa pribumi agar diketahui khalayak ramai.

Daendels yakin, dengan penggabungan itu, Inggris akan segera menyerang Jawa. Oleh karena itu, ia menyiapkan tentara gabungan Eropa dan pribumi di bawah pimpinan Kepala Staf Umum Kolonel Gutzlaff. Jumlah tentara yang ada di Jawa sebanyak 17.774 orang dengan rincian 2.430 tentara Eropa, 1.506 tentara Ambon, 13.838

<sup>19</sup> Ketika Louis Napoléon menjadi Raja Belanda, wilayah koloni di bawah tanggung jawab Menteri Perdagangan dan Koloni van der Heim. Setelah perjanjian Rembouillet, wilayah koloni di bawah tanggung jawab Menteri Angkatan Laut dan Koloni. Perbedaan penamaan ini disebabkan berubahnya status wilayah koloni, yang semula merupakan urusan ekonomi, saat itu berubah menjadi masalah politik.

tentara Jawa. Pasukan ini semuanya ditempatkan di Jawa, hanya tinggal 400 tentara saja yang ditempatkan di luar Jawa seperti di Palembang, Makasar, dan Timor.<sup>20</sup> Persiapan menghadapi serangan Inggris atas pulau Jawa dilaporkan juga kepada Menteri Angkatan Laut dan Koloni Decres tanggal 22 April 1811. "*J'ai réuni ici presque totalité de nos troupes.... J'étais campé à Meester Cornelis .... où j'avais rassemblé environ treize mile hommes*" 'Saya kumpulkan di sini hampir semua pasukan kita.... Saya bermarkas di (Benteng) Meester Cornelis .... saya mengumpulkan kurang lebih tiga belas ribu orang' (Deventer 1981:798-799).

Keyakinan Daendels tentang serangan Inggris atas pulau Jawa semakin kuat ketika menerima surat dari Menteri Angkatan Laut dan Koloni Decres yang dibawa oleh awak kapal *Claudius Civilis* di Batavia, mengenai informasi keputusan Inggris untuk menaklukkan Jawa. Daendels segera menyusun strategi pertahanan darat untuk menghadapi pendaratan armada Inggris. Tentara Inggris akan

dibiarkan mendarat, namun semua infrastruktur akan dibongkar, sehingga tentara Inggris akan mati karena tidak adanya air minum dan karena keganasan iklim kota Batavia.

Sementara itu dari Paris, Brigadir Jenderal Jumel menerima perintah dari Kaisar Napoléon Bonaparte untuk berangkat ke Jawa menggunakan kapal perang *Denaif* untuk mengawal Jenderal Jan Willem Janssens, mantan Gubernur Jenderal Tanjung Harapan, yang akan menggantikan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Jawa. Daendels dipanggil kembali ke Paris, Prancis oleh Napoléon Bonaparte karena ia memerlukan perwira tinggi untuk memimpin pasukan Brigade Berg, Baden dan Hassen dari Divisi VI Angkatan Darat Prancis (*Grande Armée*) dalam rangka rencana penyerbuan Napoléon Bonaparte ke Rusia (Besier 1989:94–95). Pada tanggal 15 Mei 1811, Janssens tiba di Buitenzorg.

Sesuai perintah Napoléon Bonaparte, dalam waktu 1 x 24 jam, Daendels harus menyerahkan kekuasaannya kepada Janssens. Tanggal 16 Mei Daendels menyerahkan kekuasaan sebagai Gubernur Jenderal kepada Janssens. Pada tanggal 29 Juni 1811 Daendels meninggalkan Jawa menuju Paris dengan menggunakan kapal *Sapho* (Lihat Surat Menteri Angkatan Laut dan Koloni Decres kepada Daendels tanggal 28 Nopember 1810 dalam

<sup>20</sup> Laporan jumlah tentara yang berada di Jawa bisa dilihat pada Lampiran jilid II *Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen onder het Bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels in de jaren 1808–1811*, diterbitkan di 's Gravenhage tahun 1814 yang merupakan laporan pertanggungjawaban Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Jawa.

*Documenten Omtrent Daendels, Tweede deel, 'S Gravenhage, Martinus Nijhoff, halaman 459).*

### 5. Penyerangan Inggris ke Pulau Jawa

Penaklukan pulau Jawa telah cukup lama direncanakan Inggris. Rencana itu bahkan tercium oleh beberapa orang Belanda yang pernah memiliki pengaruh besar terhadap VOC di Hindia Timur. Utusan dikirim ke Inggris agar Jawa dijadikan wilayah netral dan meminta Inggris agar membatalkan rencananya untuk menaklukkan Jawa. Namun, Inggris menolak usulan itu, dan menahan kapal *Hector* yang mereka gunakan, kemudian membawa mereka ke London.

Setelah Maluku berhasil dikuasai tahun 1810, timbul gagasan dari pimpinan Inggris untuk mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur di Maluku dan rencana penyerangan ke Jawa. Ketika mendengar rencana itu, Raffles segera menemui Gubernur Jenderal Gilbert Lord Minto di Benggala, India untuk menanyakannya, dan untuk memperoleh informasi selengkapnya dari atasannya itu. Lord Minto menjelaskan bahwa Jawa adalah pulau amat strategis yang berhadapan dengan India, dan merupakan pintu gerbang antara Asia, Afrika dan Eropa di samping Malaka yang telah dikuasainya. Menurut rencana Jawa

akan digabungkan dengan India. Oleh karena itu, Lord Minto merencanakan untuk mengumpulkan suatu armada yang berkekuatan 90 kapal dengan personil sebanyak 10.000 orang (Stapel 1940:91). Pengumpulan armada besar-besaran dikerahkan oleh Lord Minto untuk menyerang Jawa, dengan mengerahkan armada dari Madras dan Malaka. Dari Malaka, rute perjalanan ditentukan melalui High Islands di Selat Malaka, Tanjung Sumbar di Ujung Barat Kalimantan. Semua tentara yang dibawa dengan armada Inggris dikumpulkan di sini untuk selanjutnya menuju ke Jawa dengan arah pendaratan di Cilincing, di sebelah timur Batavia.

Rencana penyerbuan ke Jawa dilaksanakan sesuai rencana. Pada tanggal 4 Agustus 1811 tentara Inggris mendarat di Cilincing. Dalam waktu yang relatif singkat, pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens harus menandatangani penyerahan pulau Jawa kepada Inggris.

### 6. Kesimpulan

Dalam kajian ini telah dilakukan pembahasan tentang pentingnya pulau Jawa bagi dua negara adi dayaà besar? (Inggris dan Prancis) pada awal abad XIX. Posisi geografis pulau Jawa sangat penting karena Selat Malaka, Sunda, Bali, dan Lombok merupakan pintu gerbang jalur pelayaran yang

menghubungkan antara Asia dan Afrika serta Eropa. Selain itu, Jawa juga dikenal sebagai pulau yang kaya akan hasil bumi komoditas ekspor, dan banyak tenaga kerja yang bisa digunakan sebagai tenaga tentara pembantu pribumi.

Setelah kejatuhan VOC, wilayah ini masih tetap dipertahankan dan bahkan diberikan perhatian khusus agar jangan jatuh ke tangan Inggris. Dengan demikian, upaya Belanda dan Prancis mempertahankan pulau Jawa setelah kejatuhan VOC memiliki nilai lain, yakni nilai strategis dari sudut militer. Bagi Inggris, apabila Jawa tidak dikuasai, kepentingan perdagangan Inggris akan terganggu, sementara Penang telah berada di bawah kekuasaan mereka. Untuk mengamankan jalur pelayaran ini, pulau Jawa harus ditaklukkan.

Selama pemerintahan Daendels, Jawa tidak dapat dilepaskan dari konteks peristiwa politik yang terjadi di Eropa. Sepanjang sejarah Jawa, masa ini ditandai dengan kenyataan bahwa eksistensi pulau ini sangat terpengaruh dan tergantung pada eskalasi politik dan perubahan pemerintahan di Eropa, khususnya negeri Belanda. Hal ini tidak pernah terjadi pada periode sebelum maupun sesudah masa itu. Rangkaian perkembangan politik global yang terjadi di Eropa dengan puncaknya dominasi Kaisar Napoléon Bonaparte telah memberikan dampak yang sangat luas

pada perubahan tatanan dunia, termasuk Jawa. Untuk pertama kalinya Jawa memasuki konteks globalisasi internasional yang berpusat di Eropa.

Prancis maupun Inggris memiliki opini yang sama tentang peran pulau Jawa. Jawa sangat strategis sebagai pangkalan dalam rangka mengamankan India, yang dianggap memiliki kekayaan melebihi jumlah kekayaan negara-negara Eropa. Prancis yang menginginkan melakukan okupasi atas India menjadikan Jawa sebagai *center of gravity*, dalam rangka proses penguasaan itu. Sementara bagi Inggris, India sudah berada di bawah kekuasaannya. Pulau Jawa dijadikan bagian dari Kerajaan India, guna mengamankan jalur pelayaran dari serangan bajak laut yang berasal dari para penguasa pribumi. Oleh karena itu, apabila pulau Jawa dikuasai, Gubernur Jenderal Lord Minto akan mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil Gubernur Jenderal (sesuai permintaan Raffles) yang diharapkan dapat mengendalikan dan mempengaruhi para raja pribumi dan negara Melayu di Malaka. Dengan demikian, pulau-pulau lain berada di bawah koordinasi pulau Jawa.

Sementara itu Inggris beranggapan, dengan menguasai pulau Jawa, dominasi Prancis dan Belanda di Hindia Timur akan habis. Terlepas dari bergabungnya Jawa

dengan Prancis, siapa pun yang menguasai Jawa, pulau Jawa tetap memiliki nilai strategis karena posisi dan jumlah penduduknya yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh mereka yang menguasainya. ■

## Daftar Pustaka

### A. Arsip

#### - Manuskrip

Manuskrip AF IV 1793, 31 Agustus 1803. Arsip Nasional Paris, Prancis. CARAN, Paris, Prancis.

#### - Leksikografi (arsip yang diterbitkan)

1. *Staat der Nederlandshe Oostindische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem daendels in de jaren 1808-1811*. In 'sgravenhage. 1814. S'Gravenhage. Bijlagen Tweede Deel.

2. *Brief van Minister. Decrès aan Daendels, 24 novembre 1810*. dalam JWG De Roo 1910. *Documenten Omtrent Herman Willem Daendels. Tweede Deel*. S'Gravenhage: Martinus Nijhoof.

#### - Internet

Le traité de la Paix d'Amiens 25 mars 1802. ([http://naploéon.org/traité\\_damiens.html](http://naploéon.org/traité_damiens.html)).

### B. Buku dan Majalah

Berstein, Milza, Serge berstein, JL. Monneron. 1978. *Histoire Classe du Troisième. De la Révolution au Monde d'Aujourd'hui*. Paris: Fernand Nathan Editeur.

Daendels, HW. 1814. *Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels in de jaren 1808 – 1811*. in 's Gravenhage.

Day, Clive. 1904. *The Dutch in java*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Deventer, ML..van. 1891. *Daendels Raffles*. Dalam *Indische Gids*. Jilid 1

\_\_\_\_\_. 1892. *Daendels Raffles*. Dalam *Indische Gids*. Jilid 2

Eymeret, Joël. 1973. "L'administration napoléonienne en Indonésie". Dans *Revue Française d'Histoire d'Outre Mer*. No. 218. 1<sup>er</sup> semestre 1973.

Eymeret, Joël. sd. *Herman Willem Daendels Général Napoléonien Gouverneur à Java*. Thèse de doctorat. Paris : EHESS.

Groenewold, CA. 1989. 'Herman Willem Daendels, Katalysator van de eenheidsstaat'. Dalam F Pereboom. *Herman Willem Daendels (1762 – 1818)*. Kampen.

Hageman, J. 1856. "Geschiedenis van het Hollandsch Gouvernement op Java" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap voor Indische Tall-, Land en volkenkunde*, Jilid V. Tahun 1856.

Haans, F, de. 1922. *Oud Batavia. Eerste Deel*. Batavia: G. Kolff & Co.

Hana, Williard A. 1988. *Hikayat Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hinnewinkel, Mj, JC Hinnewinkel, JM. Sivrine, M. Vincent. *Histoire*. Paris: Fernand Nathan.

Latreille, André. 1974. *L'Ere Napoléonienne*. Paris : Armand Colin, Collection U.

Mangkudilaga, Machfudi. 1981. *Bunga Rampai Sejarah Ketatanegaraan Hindia Belanda*. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Marihando, Djoko. 2005. *Jatuhnya Pulau Jawa ke Tangan Inggris: Kesalahan Strategi Pertahanan Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens*. Makalah Seminar Hasil Penelitian Pengajar Departemen Sejarah FIB UI.

Nembrini, JL, J. Bordes, P. Polivka. 1986. *Histoire*. Paris : Classiques Hachette.

Pereboom, F. dan HA. Stalknecht. 1989. *Herman Willem Daendels ( 1762 – 1818)*. Kompen.

Stapel, FW. 1940. *Geschiedenis van Nederlandsche Indie*. Tome V. Amsterdam : Uitgeversmaatschappij. *Tijdschrift voor Indie*. 1877